

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku ekonomi harus mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, yang kemudian dapat menghapuskan kemiskinan.

Pemerintah daerah dan masyarakat perlu mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang akan membangun perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah itu sendiri. Di saat penanggulangan krisis maupun pemuihan ekonomi pasca krisis, tampaknya telah menjadi kesepakatan nasional untuk melakukan pengembangan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komporatif dan kompetitif termasuk dalam menghadapi pasar global sehingga perlu dikembangkannya sektor ekonomi yang “*resource based industrialization*” terutama yang berbasiskan sumberdaya alam pertanian. Dengan demikian pengembangan agrobisnis dan agroindustri harus menjadi *leading sector* atau *core* dalam proses pembangunan, terlebih lagi kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (Damanhuri,2000)

Dalam menghadapi era globalisasi Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi. Salah satu arah kebijakan

tersebut adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dari produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kelautan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat (GBHN,2001: 64)

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi yang lebih luas kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, termasuk mengelola sumberdaya kelautan di wilayahnya. Dalam pasal 3 UU No. 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis patai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu pada pasal 10 disebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam mengelola laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi, sehingga dengan dasar Undang-Undang tersebut, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor mana yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya

menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2005)

Menurut Kelompok Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), perikanan merupakan subsektor yang masuk dalam sektor pertanian. Karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah laut yang luas, perikanan merupakan subsektor yang penting. Namun di Indonesia subsektor ini belum dikelola dengan baik sehingga hasilnya belum maksimal.

Sumber daya ikan yang dapat dibudidaya maupun ditangkap di Kabupaten Gresik dinilai memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi, maka dari itu, banyak penduduk Gresik yang memilih untuk menjadi petani sekaligus menjadi nelayan di laut maupun di sawah tambak untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dan keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PEMETAAN SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TAMBAK PAYAU, TAWAR DAN PENANGKAPAN DI KABUPATEN GRESIK** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada Sub Sektor Perikanan Kabupaten Gresik yang menjadi Sub Sektor Basis atau Sub Sektor Non Basis?

2. Apakah ada Sub Sektor Kabupaten Gresik yang menjadi Sub Sektor yang mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik?
3. Apakah ada Sub Sektor Perikanan Kabupaten Gresik yang menjadi Sub Sektor yang pertumbuhannya relatif cepat ataupun tumbuh relatif lambat di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah ada Sub Sektor Perikanan Kabupaten Gresik yang menjadi Sub Sektor yang mempunyai keuntungan lokasional di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi basin dan non basis sub sektor perikanan di Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik
3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan subsektor perikanan Kabupaten Gresik
4. Untuk mengetahui keuntungan lokasional sub sektor perikanan pada Kabupaten Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat peneliti ini adalah :

1. Bagi peneliti, Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai subsektor perikanan di Kabupaten Gresik.

2. Bagi masyarakat, Sebagai ilmu pengetahuan tambahan tentang Produk Domestik Regional Bruto di subsektor perikanan.
3. Bagi instansi, Sebagai masukan serta informasi kepada instansi terkait agar dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini yang berkaitan dengan subsektor perikanan di Kabupaten Gresik